



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KEUANGAN

BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TIMUR



SEMESTER 1 TAHUN 2024



balaibahasa.jawatimur



Balai Bahasa Jawa Timur



@BB_Jatim

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, Juli 2024
Kepala,

Umi Kulsan, S.S., M. Hum.
NIP. 197401161997032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. II. Neraca	4
III. III. Laporan Operasional	5
IV. IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Dasar Hukum	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3 Basis Akuntansi	9
A.4 Dasar Pengukuran	8
A.5 Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1 Pendapatan	18
B.2 Belanja Negara	18
B.2.1 Belanja Pegawai	19
B.2.2. Belanja Barang	20
B.2.3. Belanja Modal	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	23
C.3 Persediaan	24
C.4 Tanah	24
C.5 Peralatan dan Mesin	24
C.6 Gedung dan Bangunan	25
C.7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	26
C.8. Aset Tetap Lainnya	26
C.9. Aset Tak Berwujud	27
C.10 Kontruksi Dalam Pengerjaan	27
C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
C.12 Aset Lainnya	28
C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya	29
D.14 Utang Kepada Pihak Ketiga	30
C.15 Ekuitas	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .	33
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	33

D.2	Beban Pegawai	33
D.3	Beban Persediaan	34
D.4	Beban Barang dan Jasa	35
D.5	Beban Perjalanan Dinas	36
D.6.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	36.
D.7.	Beban Pemeliharaan	36
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.9.	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	38
D.10	Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional	38
D.11.	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	38
D.12.	Beban Khusus Penangan Pandemi Covid-19	39
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1	Ekuitas Awal	40
E.2	Surplus/Defisit LO	40
E.3	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	40
E.4	Lain-Lain	41
E.5	Transaksi Antar Entitas	41
E.6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	41
E.7	Ekuitas Akhir	42
F.	PENGUNGKAPAN LAIN	43
	Lampiran	44

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, Juli 2024
Kepala,

Umi Kulsurni, S.S., M. Hum.
NIP 197302161997032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I, Tahun 2024 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024. Realisasi Belanja Negara pada Juni 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp55.293.200. Dari alokasi anggaran sebesar Rp0;- Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan hasil Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Kembali belanja barang TAYL di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Realisasi Belanja Negara pada Juni 2024 sebesar Rp5.684.508.292. atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar. Rp14.355.290.000;-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, Nilai Aset per Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp242.464.447.228. yang terdiri atas: Aset Lancar sebesar Rp90.306.592;- Aset Tetap (neto) sebesar Rp241.570.168.661;- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp653.971.975;- Nilai Kewajiban dan Ekuitas per Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp435.238.106;- Jumlah Kewajiban Ekuitas sebesar Rp242.464.447.228;-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Juni 2024 adalah sebesar Rp54.915.200;,, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.098.015.585;- . Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp378.000 sehingga entitas mengalami surplus/Defisit-LO sebesar Rp(7.042.722.385).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada adalah sebesar Rp243.159.004.531;- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(7.042.722.385) ditambah Koreksi yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0.00;- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.912.925.976;- sehingga Ekuitas akhir pada Juni 2024 adalah senilai Rp242.029.209.122;- Terjadi kenaikan/penurunan Ekuitas senilai Rp(1.129.795.409);-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode awal tahun dari 1 Januari—31 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I (JANUARI—JUNI) 2024

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
I. Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Pajak Dalam Negeri	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pajak Perdagangan Internasional	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,	55.293.200,	55.293.200,	0	0,	16.852.900,	(16.852.900,)	0,
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Pendapatan BLU	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0,	55.293.200,	55.293.200,	0	0,	16.852.900,	(16.852.900,)	0,
III. Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0,	55.293.200,	55.293.200,	0	0,	16.852.900,	(16.852.900,)	0,
B. Belanja Negara	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
I. Belanja Pemerintah Pusat	14.355.290.000,	5.684.508.292,	(8.670.781.708,)	99	13.786.488.000,	5.467.921.456,	8.318.566.544,	99,
1. Belanja Pegawai	3.191.651.000,	1.635.331.965,	(1.556.319.035,)	98	2.932.554.000,	1.482.877.234,	1.449.676.766,	98,
2. Belanja Barang	11.038.639.000,	3.924.364.334,	(7.114.274.666,)	99	10.176.373.000,	3.911.411.222,	6.264.961.778,	99,
3. Belanja Modal	125.000.000,	124.811.993,	(188.007,)	100	677.561.000,	73.633.000,	603.928.000,	0,
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
5. Belanja Subsidi	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
6. Belanja Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
7. Belanja Bantuan Sosial	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
8. Belanja Lain-lain	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Transfer ke Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
a. Dana Perimbangan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Dana Transfer Umum	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
a. Dana Bagi Hasil	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
b. Dana Alokasi Umum	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Dana Transfer Khusus	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
b. Dana Insentif Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
c. Dana Keistimewaan DIY	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
d. Dana Otonomi Khusus	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Dana Desa	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Hibah Kepada Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	13.465.148.000,	13.312.179.458,	(152.968.542,)	99	6.784.905.000,	6.691.469.332,	(93.435.668,)	99,
C. PEMBIAYAAN	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
NERACA
SEMESTER I (JANUARI—JUNI) 2024

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan
ASET	2024	2023	Jumlah
1	2	3	4
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	150.000.000,00	0	
Persediaan	90.306.592,	238.709.195	-62,17%
JUMLAH ASET LANCAR	90.306.592,	238.709.195	-62,17%
ASET TETAP			
Tanah	213.445.270.000,	213.445.270.000	0,00%
Peralatan dan Mesin	11.113.471.218,	10.705.510.661	3,81%
Gedung dan Bangunan	35.969.132.422,	35.969.132.422,	0,00%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	309.234.000,	309.234.000,	0,00%
Aset Tetap Lainnya	704.145.925,	703.582.605,	0,08%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	441.262.600,	441.262.600,	0,00%
AKUMULASI PENYUSUTAN	(20.412.347.504,)	(19.327.412.651)	5,61%
JUMLAH ASET TETAP	241.570.168.661,	242.246.579.637,	-0,28%
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	49.000.000,	83.242.500	-41,14%
Aset Lain-lain	1.644.136.252,	1.742.785.732	-5,66%
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1.039.164.277,)	(1.152.312.533)	-9,82%
JUMLAH ASET LAINNYA	653.971.975,	673.715.699	-2,93%
JUMLAH ASET	242.314.447.228,	243.159.004.531,	-0,35%
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada pihak ketiga	251.300.658,	0,	0,00%
Utang yang belum ditagihkan	33.937.448,	0,	0,00%
Uang Muka dari KPPN	150.000.000,	0,	0,00%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	435.238.106,	0,	0,00%
JUMLAH KEWAJIBAN	435.238.106,	0,	0,00%
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	242.029.209.122,	243.159.004.531	-0,46%
JUMLAH EKUITAS	242.029.209.122,	243.159.004.531	-0,46%
JUMLAH EKUITAS	242.029.209.122,	243.159.004.531	-0,46%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	242.464.447.228	243.159.004.531	-0,29%

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN OPERASIONAL SEMESTER I (JANUARI—JUNI) 2024

URAIAN	2024	2023	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,
PENDAPATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0,	0,	0,
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,	0,	0,
Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0,	0,	0,
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	54.915.200,	16.852.900,	225,85
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	54.915.200,	16.852.900,	225,85
PENDAPATAN HIBAH	0,	0,	0,
Pendapatan Hibah	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Hibah	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan	54.915.200,	16.852.900,	225,85
BEBAN OPERASIONAL	0,	0,	0,
Beban Pegawai	1.828.952.623,	1.656.135.035,	10,435
Beban Persediaan	13.314.064,	16.607.757,	(19,832)
Beban Barang dan Jasa	1.986.857.597,	1.775.573.058,	11,9
Beban Pemeliharaan	299.809.381,	130.858.351,	129,11
Beban Perjalanan Dinas	1.704.295.329,	2.098.293.406,	(18,777)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	160.108.014,	9.690.316,	1.552,248
Beban Bunga	0,	0,	0,
Beban Subsidi	0,	0,	0,
Beban Hibah	0,	0,	0,
Beban Bantuan Sosial	0,	0,	0,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.104.678.577,	1.097.121.647,	0,689
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,	0,	0,
Beban Transfer	0,	0,	0,
Beban Lain-Lain	0,	0,	0,
JUMLAH BEBAN	7.098.015.585,	6.784.279.570,	4,624
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7.043.100.385,)	(6.767.426.670,)	4,074
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0,	0,	(100,)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,	0,	(100,)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,	0,	0,
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	378.000,	0,	0,
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	378.000,	0,	0,
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	0,	0,
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	378.000,	0,	(99,79)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.042.722.385,)	(6.767.426.670,)	4,068
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,
Beban Luar Biasa	0,	0,	0,
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7.042.722.385,)	(6.767.426.670,)	4,068

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SEMESTER I (JANUARI-JUNI) 2024**

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	243.159.004.531,	244.906.097.656,	(1.747.093.125,)	-0,71
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.042.722.385,)	(6.767.426.670,)	(275.295.715,)	4,07
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0,	(6.600.000,)	6.600.000,	-100
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,	0,	0,	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,	0,	0,	-
SELISIH REVALUASI ASET	0,	0,	0,	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0,	(6.600.000,)	6.600.000,	-100
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5.912.926.976,	5.070.047.461,	842.879.515,	16,62
KENAIKAN/PENURUNAN	(1.129.795.409,)	(1.704.039.209,)	574.243.800,	-33,7
EKUITAS AKHIR	242.029.209.122,	243.202.058.447,	(1.172.849.325,)	-0,48

A. PENJELASAN UMUM*Dasar Hukum***A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 TAHUN 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

-
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
 23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 25. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72/M/2023 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
 28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

A.1.1 Profil Kebijakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Organisasi unit kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

1. Kepala Balai
2. Kasubbag Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi Provinsi Jawa Timur
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
3. pengkajian bahasa dan sastra;
4. pemetaan bahasa dan sastra;
5. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
6. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;

-
7. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
 8. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur memiliki visi yang akan dicapai pada tahun 2023, yaitu “Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berbhineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan Bahasa dan sastra” Sedangkan misi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan di Jawa Timur
2. Mewujudkan Kelestarian Bahasa dan Sastra daerah di Jawa Timur
3. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap Bahasa dan sastra
4. Meningkatkan pelayanan dan kerja sama kebahasaan dan kesastraan
5. Mengoptimalkan tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

***Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan***

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan semester 1 (satu) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem SAKTI yaitu serangkaian prosedur yang menggabungkan antara Persediaan, Aset, Pembayaran, dan Pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

***Dasar
Pengukuran***

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah per tanggal pelaporan.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

*Pendapatan-
LRA*

B.1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(1) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

adalah Pendapatan Jasa UKBI diakui setelah UKBI dilaksanakan, tetapi pada Februari tahun 2021, pembayaran tes UKBI langsung dilakukan di melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

B.2. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

B.2.1. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

B.2.1. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

B.2.3. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andai.
 - (c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surata Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- (e) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan Jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- (f) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap**Aset Tetap**

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (g) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (h) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - (i) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali, pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian,
- d. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaanya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- e. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- f. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaanya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- g. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**Penyusutan
Aset Tetap****Penyusutan dan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;
 2. Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tak Berwujud pemerintah dapat berupa: Software computer, Lisensi dan franchise, Hak Paten dan Hak Cipta, dan Hasil Kajian.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

- Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau factor hukum atau factor ekonomis mana yang lebih pendek

2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai

batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

H. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang masih Harus Dibayar, Pendpaatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

h. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

***Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali***

i. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan belanja antara lain:

Uraian	Anggaran	Anggaran setelah revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	55.293.200,00
Jumlah Pendapatan		
Belanja Pegawai	3.191.651.000,00	1.635.331.965,00
Belanja Barang	11.038.639.000,00	3.924.364.334,00
Belanja Modal	125.000.000,00	124.811.993,00
Jumlah Belanja	14.355.290.000,00	5.684.508.292,00

B.1. Pendapatan

Realiasi
Pendapatan
Rp55.293.200;-

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir Juni 2024 adalah sebesar Rp55.293.200. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur terdiri dari penerimaan Perpajakan dan penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp55.293.200 pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut

Tabel B.1.1
Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Tahun Juni 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	Penerimaan Perpajakan			-
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp -	55.293.200	
Jumlah		Rp -	Rp 55.293.200	-

Realisasi Pendapatan Negara per Juni 2024 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang berasal dari pendapatan Penerimaan PNBP berupa sewa Aula dan Wisma.

Tabel B.1.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan per Juni 2024
Dan Juni 2023

URAIAN	REALISASI Juni 2024	REALISASI juni 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, Gedung dan Bangunan	55.293.200,00	-	0
Penerimaan kembali Barang tahun Anggaran yang Lalu		-	0
Jumlah	55.293.200	-	55,00

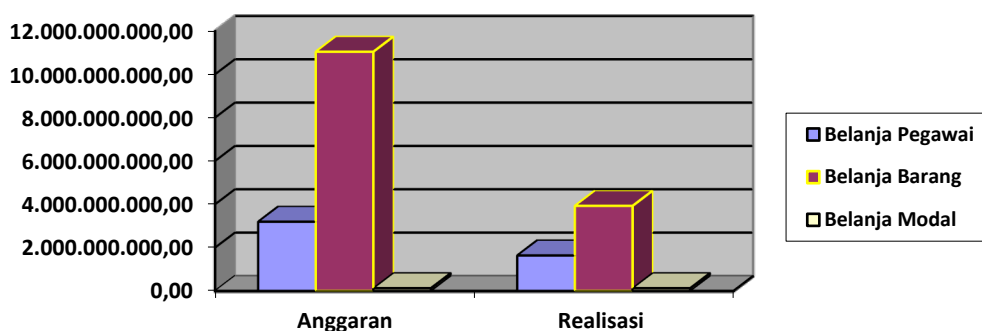
2. Belanja Negara

Realisasi belanja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sampai dengan Juni 2024 adalah sebesar Rp5.684.508.292,- atau sebesar 40% dari anggarannya sebesar Rp14.355.290.000,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel B.2.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja
Per Juni 2024

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.191.651.000,	1.635.331.965,	51,24
52	Belanja Barang	11.038.639.000,	3.924.364.334,	35,55
53	Belanja Modal	125.000.000,	124.811.993,	99,85
	Jumlah	14.355.290.000	5.684.508.292	39,60

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik B.2. berikut ini.



Pada tabel yang tertera di atas realisasi belanja per Juni 2024 yaitu sebesar Rp5.684.508.292,- atau 40% dari pagu anggaran sebesar Rp14.355.290.000,-, sedangkan realisasi per Juni 2023 yaitu sebesar Rp5.467.921.456,- atau 40% dari pagu anggaran sebesar Rp13.486.488.000,-, perbedaan pada tahun 2024 dibandingkan 2023 yaitu adanya penurunan pada belanja modal, dimana per Juni 2023 adanya kenaikan pada belanja modal. Perbandingan realisasi belanja per Juni 2024 dan Juni 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel B.2.2

**Perbandingan Realisasi Belanja Negara
Juni 2024 dan Juni 2023**

Kode	Uraian	TAHUN ANGGARAN 2024		
		REALISASI JUNI 2024	REALISASI JUNI 2023	%
51	Belanja Pegawai	1.635.331.965,	1.482.877.234,	90,68
52	Belanja Barang	3.924.364.334,	3.911.411.222,	99,67
53	Belanja Modal	124.811.993,	73.633.000,	59,00
	Jumlah	5.684.508.292	5.467.921.456	96,19

Belanja Pegawai
Rp1.635.331.965

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.635.331.965,- dari pagu Rp3.191.651.000,- dan Rp1.482.877.234,- dari pagu Rp2.932.554.000,- adanya kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 10.27% dibandingkan Juni 2023. Adanya penambahan 2 pegawai pindahan, dan adanya 1 pegawai pensiun per 1 April 2024.

Tabel B.2.1.1

**Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Juni 2024 dan Juni 2023**

Kode	Uraian	Juni 2024	Juni 2023	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.239.113.700,	1.113.754.100,	125.359.600	11,26
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.902,	17.062,	1.840	10,78
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	92.607.480,	79.802.430,	12.805.050	16,05
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	27.380.466,	23.558.194,	3.822.272	16,22
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14.400.000,	14.400.000,	-	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34.720.000,	34.720.000,	-	-
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18.706.658,	3.407.928,	15.298.730	448,92
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	64.598.640,	61.846.680,	2.751.960	4,45
511129	Belanja Uang Makan PNS	87.200.000,	98.930.000,	(11.730.000)	(11,86)
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	44.890.000,	44.440.000,	450.000	1,01
512211	Belanja uang Lembur	11.607.000,	8.001.000,	3.606.000	-
	Realisasi Belanja Bruto	1.635.242.846	1.482.877.394	152.365.452	10,27
	Pengembalian Belanja Pegawai	881	160	-	-
	Realisasi Belanja Neto	1.635.241.965	1.482.877.234	152.364.731	10,27

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.038.639.000,- dan Rp10.176.373.000 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebelumnya dengan realisasi baru. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Perbandingan Rincian Belanja Barang per Juni 2024 dan Juni 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel B.2.2.1

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang Juni 2024 dan Juni 2023

AKUN	Uraian	juni 2024	Juni 2023	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	432.754.319,	348.360.480	24,23
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.272.000,	1.806.900	25,74
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	24.732.800,	60.290.000	(58,98)
521211	Belanja Bahan	500.893.449,	462.251.540	8,36
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6.165.000,	6.165.000	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17.900.000,	23.400.000	(23,50)
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	50.500.000,	53.000.000	(4,72)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19.719.475,	19.688.233	0,16
522111	Belanja Langganan Listrik	104.461.465,	95.876.561	8,95
522112	Belanja Langganan Telepon	1.516.056,	754.150	-
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	80.016.008,	88.812.760	(9,90)
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0,	394.000	(100,00)
522141	Belanja Sewa	69.895.000,	43.290.000	61,46
522151	Belanja Jasa Profesi	295.850.000,	304.800.000	0%
522191	Belanja Jasa Lainnya	332.730.000,	189.936.450	0%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.298.625,	16.814.161	918,78
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.022.458,	76.109.445	(19,82)
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	54.745.350,	27.680.690	97,77
524111	Belanja Perjalanan Biasa	519.042.329,	419.045.852	23,86
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	132.440.000,	48.430.000	173,47
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	762.620.000,	1.338.010.000	-
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	283.810.000,	286.495.000	(0,94)
Realisasi Belanja Bruto		3.924.384.334	3.911.411.222	0,33
Pengembalian Belanja Barang		-	-	-
Realisasi Belanja Neto		3.924.384.334	3.911.411.222	0,33

Adanya kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu dengan adanya belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang meningkat dibandingkan Juni 2023 yang mencapai 916,78% diperuntukan untuk pemeliharaan gedung bertingkat, gedung tidak bertingkat dan halaman

gedung Untuk belanja langganan Listrik mengalami kenaikan sebesar 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya

Realisasi Belanja Modal
Rp124.811.993,-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp124.811.993,- atau 99% dari pagu sebesar Rp125.000.000,- dan Rp73.633.000,- atau 11% dari pagu sebesar Rp677.561.000. di tahun 2023. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin berupa:

<i>No.</i>	<i>Jenis</i>	<i>Jumlah</i>
1.	Scanner	1 unit
2.	Laptop	1 unit
3.	Televisi	1 Unit
4.	Peredam ruangan Podcast	1 Unit
5.	Karpet	2 Unit
6.	Audia Mixer	1 Unit
7.	Kasur untuk	2 Unit
8.	Tempat tidur untuk Wisma	1 Unit

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Juni 2024 dan Juni 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel B.2.3.1
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal
Juni 2024 dan Juni 2023

Uraian	Juni 2024	Juni 2023	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.811.993	73.633.000	51.178.993	69,51
Belanja Modal Lainnya	0	0	-	-
Realisasi Belanja Bruto	124.811.993	73.633.000	51.178.993	-
Realisasi Belanja Neto	124.811.993	73.633.000	51.178.993	-

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp150.000.000

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.150.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per Juni 2024

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
uang di brankas	291.000,00	
uang di rekening	115.771.552,00	
Kwitansi UP belum di pertanggungjawabkan	33.937.448,00	-
Jumlah	150.000.000	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0-

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.2.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per Desember 2023

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Rekening BNI	-	-
di brankas	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp90.306.592

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp90.360.592. dan Rp23.709.195. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.
Rincian jenis Persediaan
Per 30 Juni 2024

No Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ penurunan
117111	Barang Konsumsi	17.464.286	15.328.076,00	0,14
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	72.842.306	-	#DIV/0!
	JUMLAH	90.306.592	15.328.076	#DIV/0!

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan barang konsumsi ini ATK, barang cetakan, dan Materai, sedangkan persediaan yang dijual/diserahkan ke masyarakat berupa 1 majalah daerah yang berjudul *Lontar Using*.

Tanah
Rp213.445.270.000

C.4. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah sebesar Rp213.445.270.000 dan Rp213.445.270.000. Nilai Tanah tersebut. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.4.
Rincian Tanah
Per 30 Juni 2024

Saldo Nilai Perolehan TA 2023	213.445.270.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per Juni 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. Juni 2023	-
Nilai Buku per TA 2023	213.445.270.000

Rincian saldo tanah per Juni 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	Luas	Lokasi	Nilai
1	12.085	Jalan Gebang Putih 10, Sukolilo, Surabaya	213.445.270.000,00
2	-		
Jumlah			213.445.270.000,00

Peralatan dan Mesin
Rp11.113.471.218,-

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp11.113.471.218 dan Rp(12.000.228.753). Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.5.
Rincian Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2024	10.705.510.661
Mutasi tambah:	407.960.557
Mutasi kurang:	
Saldo per Juni 2024	11.113.471.218,00
Akumulasi Penyusutan s.d. Juni 2024	
Nilai Buku per Juni 2024	11.113.471.218

Tabel C.5.1.
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

No.	Uraian Aset	Mutasi Kurang		Mutasi Tambah	
		Jumlah Unit	Jumlah Nilai	Jumlah Unit	Jumlah Nilai
1	Alat Bantu	0,	0,	0,	0,
2	Alat Angkut Darat Bermotor	0,	0,	0,	0,
3	Alat Angkut Darat tak Bermotor	0,	0,	0,	0,
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	0,	0,	0,	0,
5	Alat Pengolahan	0,	0,	0,	0,
6	Alat Kantor	0,	0,	0,	0,
7	Alat Rumah Tangga	0,	0,	5,	52.362.293,
8	Alat Studio	0,	0,	2,	46.065.000,
9	Alat Komunikasi	0,	0,	0,	0,
10	Alat Kedokteran	0,	0,	0,	0,
11	Unit Alat Laboratorium	0,	0,	0,	0,
12	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,	0,	0,	0,
13	Peralatan Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	0,	0,	0,	0,
14	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,	0,	0,	0,
15	Pesenjataan Non Selata Api	0,	0,	0,	0,
16	Komputer Unit	0,	0,	13,	275.245.264,
17	Peralatan Komputer	0,	0,	2,	34.288.000,
18	Alat Kerja Penerbangan	0,	0,	0,	0,
19	Peralatan Olah Raga	0,	0,	0,	0,
Total		-	-	22	407.960.557

Gedung dan
Bangunan
Rp35.969.132.422

C.6. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35.969.132.422 dan Rp35.959.132.422. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.6.
Rincian Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2024	35.969.132.422
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per Juni 2024	35.969.132.422,00
Akumulasi Penyusutan s.d. Juni 2024	-
Nilai Buku per Juni 2024	35.969.132.422

Tabel C.6.1
Rincian Mutasi bertambah/berkurang

No.	Uraian Aset	Mutasi Kurang		Mutasi Tambah	
		Jumlah Unit	Jumlah Nilai	Jumlah Unit	Jumlah Nilai
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,	0,	0,	0,
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,	0,	0,	0,
3	Tugu/Tanda Batas	0,	0,	0,	0,
Total		-	-	-	-

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp309.234.000

C.7. Jalan, Irigasi, dan Bangunan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp309.234.000 dan Rp309.234.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.7.
Rincian Jalan, Irigasi, dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2024	309.234.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per Juni 2024	309.234.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. Juni 2024	-
Nilai Buku per Juni 2024	309.234.000

Tabel C.7.1.
Rincian Mutas bertambah
/berkurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No.	Uraian Aset	Mutasi Kurang		Mutasi Tambah	
		Jumlah Unit	Jumlah Nilai	Jumlah Unit	Jumlah Nilai
1	Jalan	0,	0,	0,	0,
2	Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,	0,	0,	0,
3	Jaringan Listrik	0,	0,	0,	0,
Total		-	-	-	-

Aset Tetap Lainnya
Rp704.145.925.

C.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.704.145.925. dan Rp.703.582.605. Aset tetap tersebut Aset Tetap Lainnya terdiri atas Bahan Perpustakaan tercetak, Barang bercorak Kesenian, dan Alat Bercorak kebudayaan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.8.
Rincian Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2024	703.582.605
Mutasi tambah:	563.320
Mutasi kurang:	-
Saldo per Juni 2024	704.145.925,00
Akumulasi Penyusutan s.d. Juni	-
Nilai Buku per Juni 2024	704.145.925

Tabel C.8.1.
Rincian Mutasi bertambah/berkurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian Aset	Mutasi Kurang		Mutasi Tambah	
		Jumlah Unit	Jumlah Nilai	Jumlah Unit	Jumlah Nilai
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	0,	0,	10,	563.320,
2	Barang Bercorak Kesenian	0,	0,	0,	0,
3	Alat Bercorak Kebudayaan	0,	0,	0,	0,
Total		-	-	10	563.320

Aset Tak Berwujud
Rp49.000.000.

C.9. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp49.000.000. dan Rp83.242.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang

dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berupa Software.

Tabel C.9.
Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2024	49.000.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per Juni 2024	49.000.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. Juni 2024	-
Nilai Buku per Juni 2024	49.000.000

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp441.262.600*

C.10. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.441.262.600 dan Rp.441.262.600. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Kontruksi dalam Pengejaan merupakan Aset yang sedang dalam proses pembangunan, pembangunan aset berupa gedung yang sedang dikembangkan, Kontruksi dalam Pengerjaan dilakukan melalui kontrak pada tahun 2007, tidak terjadi pembangunan lanjutan pada tahun 2008, dikarenakan Pusat (Kemdikbud) tidak menyetujui pengajuan anggaran pembangunan lanjutan gedung. Tahun 2019 menjadi temuan BPK disebabkan pembangunan terhenti atau gedung yang mangkrak sehingga disebut Kontruksi Dalam Pengerjaan. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

TABEL C.10
Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2023	441.262.600
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. Desember 2023	-
Nilai Buku per Desember 2023	441.262.600

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(20.412.347.504)*

C.11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing Rp(20.412.347.504). dan Rp(19.327.412.651). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk

Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL C.11
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	231.445.270.000		
2	Peralatan dan Mesin	11.113.471.218,00	- 9.623.537.616,00	1.489.933.602,00
3	Gedung dan Bangunan	35.969.132.422,00	- 10.586.044.968,00	25.383.087.454,00
4	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	309.234.000,00	- 173.064.920,00	136.169.080,00
5	Aset Tetap Lainnya	704.145.925,00	- 29.700.000,00	674.445.925,00
Akumulasi Penyusutan		279.541.253.565,00	- 20.412.347.504,00	27.683.636.061,00

Aset Lain-lain
Rp1.644.136.252

C.12. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah Rp1.644.136.252 dan Rp1.742.785.732 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

TABEL C.12.
Aset Lain-Lain

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2024	1.644.136.252
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per Juni 2024	1.644.136.252,00
Akumulasi Penyusutan s.d. Desember 2023	-
Nilai Buku per Desember 2023	1.644.136.252

Rincian mutasi tambahan dan kurang dari Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sebagai berikut:

TABEL C.12.1
Rincian Mutasi bertambah/berkurang Aset Lain-Lain

No.	Uraian Aset	Mutasi Kurang		Mutasi Tambah	
		Jumlah Unit	Jumlah Nilai	Jumlah	Jumlah Nilai
1	Alat Bantu	0.	0.	0.	0.
2	Alat Kantor	0.	0.	0.	0.
3	Alat Rumah Tangga	0.	0.	0.	0.
4	Alat Studio	0.	0.	0.	0.
5	Alat Komunikasi	0.	0.	0.	0.
6	Unit Alat Laboratorium	0.	0.	0.	0.
7	Komputer Unit	0.	0.	0.	0.
8	Peralatan Komputer	0.	0.	0.	0.
9	Alat SaR	0.	0.	0.	0.
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.	0.	0.	0.
11	Bahan Perpustakaan Tercetak	0.	0.	0.	0.
Jumlah		0	0	0	0.

C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortasi Aset
Lainnya
Rp(1.039.164.277)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah Rp(1.039.164.277). dan Rp(1.152.312.533). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.13.
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya

No	Jenis	Nilai Perolehan	Akum.	Nilai Buku
			Penyusutan/Amortasi	
1	Aset Tak Berwujud	49.000.000	(49.000.000)	98.000.000
3	Aset Lain-lain	164.136.252	(990.164.277)	1.154.300.529
Jumlah		1.826.028.232	(1.039.164.277)	1.252.300.529

C.14 Utang kepada pihak ketiga

*Utang Kepada
Pihak ketiga
Rp251.300.658;-*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing sebesar Rp251.300.658. dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.14
Rincian Utang Kepada pihak Ketiga

kode akun	Jenis	Realisasi Juni 2024	Realisas Juni 2023
212111	Utang Kepada pihak Ketiga	193.620.658	
212112	Utang Kepada Pihak Ketiga	57.680.000	
	Beban Modal yang Msih harus dibayar		
Jumlah		251.300.658	-

C.15. Utang yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum ditagihkan
Rp33.937.448*

Nilai utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 masing-masing sebesar Rp33.937.448 dan Rp0,00;- Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan Kuitansi UP yang belum dipertanggungjawabkan. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel C.15
Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

kode akun	Jenis	Realisasi Juni 2024	Realisas Juni 2023
218111	Utang Yang Belum Ditagihkan	33.937.448	-
Jumlah		33.937.448	-

C.16. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN
Rp150.000.000;-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan Per Juni 2023 masing-masingsebesar Rp150.000.000 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Tabel C.16.
Rincian Uang Muka dari KPPN

kode akun	Jenis	Realisasi Juni 2024	Realisas Juni 2023
219511	Uang Muka dari KPPN	150.000.000	-
Jumlah		150.000.000	-

Ekuitas

Rp242.029.209.122

C.17. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp242.029.209.122. dan Rp243.159.004.531 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS OPRASIONAL

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp54.915.200-

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp54.915.200 dan Rp16.852.900. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 225.85 persen. Hal tersebut disebabkan adanya Sewa wisma dan aula, untuk tahun 2024 harga sewa wisma dan aula masih menggunakan harga lama, dan sedang masa proses permohonan sengan harga yang baru, mengalami kenaikan secara signifikan. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL D.1.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

No	Jenis	Juni 2024	Juni 2023
1	Pendapatan sewa, tanah, gedung, dan bangunan	54.915.200,00	16.852.900,00
2	Pendapatan Ongkos Perkara		
Jumlah		54.915.200,00	16.852.900,00

Beban Pegawai
Rp1,828.952.623

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.828.952.623 dan Rp1.656.135.035. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 10.4 persen dibandingkan dengan Tahun 30 Juni 2023 disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja pegawai tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan 2 pegawai mutasi dari UPT lain, serta 1 pegawai pensiun per 1 April 2024. Rincian Beban Pegawai Tahunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL D.2.
Rincian Beban Pegawai
30 Juni 2024, dan 30 Juni 2023

No	Jenis	Juni 2024	Juni 2023	Kenaiakan/ penurunan %	Persentase
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.397.404.000	1.254.244.300	143.159.700,000	11,41%
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	20.942	18.965	1.977,000	10,42%
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	104.508.090	89.868.410	14.639.680,000	16,29%
4	Beban Tunj Anak PNS	30.758.604	26.601.892	4.156.712,000	15,63%
5	beban Tunj. Struktural PNS	16.200.000	16.200.000	-	0,00%
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	39.060.000	39.060.000	-	0,00%
7	Beban Tunj. PPh PNS	18.940.155	3.537.588	15.402.567,000	435,40%
8	Beban Tunj. Beras PNS	72709680	69.668.040	3.041.640,000	4,37%
9	Beban Uang Makan PNS	87.290.000	98.930.000	(11.640.000,000)	-11,77%
10	Beban Tunjangan Umum PNS	50.455.000,00	50.005.000,00	450.000,000	0,90%
11	Beban Uang Lembur	11.607.000,00	8.001.000,00	3.606.000,000	45,07%
Jumlah		1.828.953.471	1.656.135.195	172.818.276,000	10,44%
Pengembalian beban pembulatan		881	160		
Jumlah		1.828.952.590	1.656.135.035	172.817.555,000	10,43%

Beban
 Persediaan
 Rp13.314.064,-

D.3. Beban Pesediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.314.064 dan Rp16.607.757 terjadi penurunan sebesar (0.2%) dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan tahun 2024 mengalami penurunan pembelian ATK kantor sudah masuk ke akun belanja barang konsumsi. Rincian Persediaan untuk tahun 2024 dan Tahun 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.3.
Rincian Persediaan Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Juni 2024	Juni 2023	NAIK (TURUN) %	%
Beban Persediaan	13.314.064	16.607.757,0	(3.293.693)	(0,20)
Jumlah	13.314.064	16.607.757	-3.293.693	-0,20

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.986.857.597 dan Rp1.775.573.058. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa per Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 11.9 persen dibandingkan dengan Tahun 30 Juni 2023 disebabkan oleh Kenaikan beban barang dan jasa pada tahun 2024 terdiri dari Beban bahan, beban langganan listrik, dan beban jasa lainnya berupa peliputan lomba mendongeng bhs jawa, peliputan diseminasi kongres peliputan musikalisasi puisi peliputan dubas, peliputan karangtina dubas, pembekalan dubas, peliputan krida Bahasa, honor penulis naskah Buku terjemahan, honor penulis naskah cerita anak dwi bahasa honor pelayanan kerumahtanggaan, belanja upaya pencegahan penggunaan narkoba, belanja pelayanan perpustakaan belanja pembinaan minat bakat, Belanja honor peningkatan kompetensi SDM, belanja layanan tata kelola Lembaga, belanja peresmian kantor baru, belanja pengembangan OJS Atavisme, belanja honor konten media sosial. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4.
**Rincian Beban Barang dan Jasa
Juni 2024 dan Desember 30 Juni 2023**

No	Jenis	Juni 2024	Juni 2023	Kenaikan/ penurunan %	Persentase
1	Beban Keperluan Perkantoran	485.365.819	406.066.445	79.299.374,000	19,53%
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.272.000	1.866.900	405.100,000	21,70%
3	Beban Honor Oprasional Satker	24.732.800	73.440.000	(48.707.200,000)	-66,32%
4	Beban Bahan	507.493.449	464.033.044	43.460.405,000	9,37%
5	Beban Honor Output Kegiatan	6.165.000	6.165.000	-	0,00%
6	Beban barang Non Oprasional lainnya	17.900.000	23.400.000	(5.500.000,000)	-23,50%
7	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	50.500.000	53.000.000	(2.500.000,000)	-4,72%
8	beban Langganan Listrik	104.461.465,00	110.696.761	(6.235.296,000)	-5,63%
9	beban Langganan Telepon	1.516.056	880.198	635.858,000	72,24%
10	Beban Langganan Daya dan jasa lainnya	80.016.008	97.604.260	(17.588.252,000)	-18,02%
11	Beban Jasa Pos dan Giro	-	394.000	(394.000,000)	-100,00%
12	Beban Sewa	69.875.000,00	43.290.000,00	26.585.000,000	61,41%
13	Beban Jasa Profesi	298.550.000,00	304.800.000,00	(6.250.000,000)	-2,05%
14	Beban Jasa Lainnya	338.010.000,00	189.936.450,00	148.073.550,000	77,96%
Jumlah		1.986.857.597	1.775.573.058	211.284.539,000	11,90%

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.704.295.329

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.704.295.329 dan Rp2.098.293.406. Beban Perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban perjalanan dinas 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar (18.8) persen disebabkan oleh beban perjalanan dinas terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan di luar maupun di dalam kota. Rincian Beban perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 30 Juni 2023:

TABEL D.5.
Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	JUNI 2024	JUNI 2023
524111	Beban Perjalanan Biasa	520.425.329	425.358.406
524113	Beban Perjalanan Dinas dalam kota	137.440.000	48.430.000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	762.620.000	1.338.010.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	283.810.000	286.495.000
Jumlah		1.704.295.329	2.098.293.406

Beban Barang
untuk
diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp160.108.014.

D.6. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp160.108.014 dan Rp9.690.316. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 15.5 persen dibandingkan dengan Tahun 30 Juni 2023 disebabkan oleh kenaikan beban barang untuk diserahkan masyarakat diantara 1 jurnal, dan 5 Majalah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL D.5.
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Juni 2024
dan 30 Juni 2023**

URAIAN JENIS BEBAN	JUNI 2024	JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	160.108.014	9.690.316	15,52
Jumlah	160.108.014	9.690.316	1.552

Beban
pemeliharaan
Rp299.809.381

D.7. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp299.809.381 dan Rp130.858.351. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.29 persen dibandingkan dengan Tahun 30 Juni 2023, dikarenakan perpindahan Balai Bahasa Provinsi Jawa

Timur Ke eks BPPAUD Dikmas per Januari 2023 yang berada di Surabaya maka adanya Kenaikan realisasi anggaran yang menitik beratkan pada pemeliharaan gedung bertingkat, Gedung tidak bertingkat, dan halaman kantor, untuk beban pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan inventaris kantor PC, Printer, Genset 150 KVA dan Genset 250 KVA, juga AC Split, masih sama dengan tahun sebelumnya menitik beratkan pada perluasan jaringan internet, podcast, pemeliharaan lainnya berupa pemeliharaan laman, aplikasi komdik, kasada, laman, dan pemeliharaan aplikasi lainnya, pemeliharaan kendaraan dinas kantor. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.7.
Rincian Beban Pemeliharaan Juni 2024 dan 30 Juni 2023

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.298.625,	16.814.161,	9,19
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.465.406,	86.098.500,	-0,15
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	54.745.350,	27.945.690,	0,00
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	0,	0	0,00
Jumlah		299.509.381	130.858.351	1,29

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.104.678.577

D.8. Beban Penyusutan dan Amortasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.104.678.577 dan Rp1.097.121.647. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rinci Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.8.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortasi
Tahun 2023 dan 30 Juni 2023

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Juni 2024	Juni 2023	NAIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	413.108.308,00	405.551.378,	64,81
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	668.387.160,	668.387.160,	-99,76
591312	Beban Penyusutan Irigasi	1.620.323,	1.620.323,	12,27
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.819.062,	1.819.062,	985,38
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	19.743.724,	19.743.723,	5495,09
Jumlah		1.104.678.577	1.097.121.646	6.458

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset
Non Lancar Rp0

D.9. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel D.7.
Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI 2023	REALISASI 30 Juni 2023	PENURUNAN/ KENAIKAN
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp378.000

D.10. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp378.000 dan Rp0. Yang diperoleh dari pengembalian kelebihan bayar sewa kegiatan FTBI 2023.

Tabel D.10.
**Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan
JUNI 2024 dan 30 Juni 2023**

URAIAN JENIS BEBAN	Juni 2024	Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	378.000,00	0,	-
	378.000	0	0

Pos Luar Biasa
Rp0

D.11. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.11.
Rincian Pos Luar Biasa Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Juni 2024	Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	0,	-
Beban Perjalanan Dinas	-	0,	
Beban Persediaan	-	0,	
	0	0	0

Rincian
Beban
khusus
Penangan
covid-19 Rp0

D. 12. Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp0,- dan tahun 30 Juni 2023 sebesar Rp24.093.090., adanya penurunan pada akun khusus penanganan Covid-19 dibandingkan tahun 30 Juni 2023, dikarenakan akun tersebut tahun 2023 akun tersebut tidak digunakan di tahun 2023 dikarenakan sudah tidak lagi darurat, berikut rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19:

Tabel D.12.
Rincian Beban Khusus Penangan Pandemi Covid-19

URAIAN JENIS BEBAN	Juni 2024	Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Oprasional-penanganan pandemi Covid-19	0,	0	0,00
Beban Barang Non Oprasional-penanganan pandemi Covid-19	0,	0	0,00
Beban Barang Persediaan-penanganan pandemi Covid-19	0,	0	0,00
BebanJasa-penanganan pandemi Covid-20	0,	0	0,00
Beban Barang Oprasional-penanganan pandemi Covid-19	0,	0	0,00
Beban Pemeliharaan Oprasional-penanganan pandemi Covid-20	0,	0	0,00
	0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp243.159.004.531

E. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp243.159.004.531. dan Rp244.906.097.656,00

Surplus (deficit)
Rp(7.042.722.385)

E.1 Surplus (Defisit) LO

Jumlah surplus (deficit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(7.042.722.385) dan Rp(6.767.426.670). Surplus/Dedisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan Non Oprasional dan Pos luar biasa

Koreksi yang
menambah/mengurangi
ekuitas Rp(0)

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(6.660.000) yaitu sebagai berikut.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0;-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0;-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Selisih Revaluasi Aset
Rp0;-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel E.3.4
Selisih Revaluasi Aset

JENIS ASET	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	0

Koreksi Aset tetap Non Revaluasi Rp.0.00;-

E.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00;- dan Rp(6.660.000). Koreksi ini.

Tabel E.4.5

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	- 6.660.000,00
		-	-
		0	-6.660.000

.Transaksi Antar Entitas Rp5.912.926.976

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.912.926.976 dan Rp5.070.047.461 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

AKUN	JENIS ASET	Juni 2024	Juni 2023
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5.684.508.292,00	5.467.921.456,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	- 55.293.200,00	- 16.852.900,00
313211	Transfer Keluar	-	- 381.021.095,00
313221	Trasfer Musak	283.711.884,00	-
		-	
		5.912.926.976	5.070.047.461,00

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DKEL sebesar Rp5.684.508.292, sedangkan DDEL sebesar Rp(56.293.200)

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp0, sedangkan transfer masuk per 30 Juni 2024 sebesar Rp283.711.884.

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp(1.129.795.409)

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai kenaikan/penurunan Ekuitas yang berakhir pada Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp(1.129.795.409),- dan Rp(1.704.039.209) terjadi penurunan pada Juni 2024 sebesar Rp574.243.800.

Ekuitas Akhir
Rp242.029.209.122

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal untuk periode yang berakhir per Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp242.029.209.122;- dan Rp243.202.058.447;- adanya penurunan pada ekuitas akhir dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp(1.172.849.325).